



Perbandingan Kebijakan Pendidikan antara Negara Korea Selatan dan Korea Utara

Hindun Qurrotu Aini¹, Abdal Malik Fajar Alam²

^{1,2}Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Email: ¹qurrotu.hindun@gmail.com, ²abdalmalikfajaralam@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted: 20-12-2023

Accepted: 09-01-2024

Published: 28-01-2024

Keywords:

*Education
Comparison
Korea
Policy*

Abstract

This research provides a deeper understanding of significant differences in educational approaches and their impact on human resource development in both Koreas. Education is crucial and a primary focus in every country's issues, as the level of education often determines a nation's advancement. The majority of countries mandate their residents to experience and acquire education within a specified timeframe. South Korea and North Korea originated from one country, but the influence of two major world blocs led to the division of Korea into two parts, the South and the North. This study aims to compare the education systems between South Korea and North Korea. South Korea, embracing liberalism and employing a democratic governance system, has managed to establish itself as one of the countries with the best education systems globally, contributing to its status as an advanced nation. On the other hand, North Korea, adhering to communism and employing an authoritarian government system, restricts social mobility and knowledge dissemination. The research methodology employed is qualitative, utilizing a descriptive comparative approach through literature review. The findings reveal that education in South Korea is highly organized, ranging from institutions like KICE to programs initiated by KOICA. Human resources from South Korea tend to excel in various sectors. Meanwhile, North Korea's education system focuses on ideology, with a lack of academic freedom impacting the quality of human resources. Consequently, human resources from North Korea are categorized as low quality. In an effort to improve the quality of education, it must go hand in hand with the improvement of the human resources' quality in a country so that the people living within it can have a decent life.

Abstrak

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan signifikan dalam pendekatan pendidikan dan dampaknya terhadap pengembangan SDM di kedua Korea. Pendidikan merupakan hal penting dan menjadi fokus utama dalam permasalahan setiap negara. Negara yang maju ditentukan dengan tingkat pendidikan tinggi. Mayoritas seluruh negara mewajibkan penduduk untuk merasakan dan mendapatkan pendidikan dengan batas tahun tertentu. Negara Korea Selatan dan Korea Utara berasal dari satu negara. Akibat dari pengaruh dua kubu besar dunia menyebabkan terpecahnya negara Korea menjadi dua bagian selatan dan utara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pendidikan antara Korea Selatan dengan Korea Selatan. Korea Selatan dengan menganut paham liberalisme dan menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis mampu menjadikannya sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia serta menjadikannya negara maju. Sedangkan di Korea Utara

yang menganut paham komunisme dan menggunakan sistem pemerintahan otoriter menyebabkan keterbatasan pergerakan sosial dan pengetahuan. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif menggunakan deskriptif komparatif dengan cara studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan di Korea Selatan sangat terorganisir dengan rapi mulai dari lembaga KICE hingga adanya program dari KOICA. SDM dari Korea Selatan cenderung unggul dalam berbagai sektor. Sementara di Korea Utara sistem pendidikan berfokus pada ideologi dan kurangnya kebebasan akademis sehingga mempengaruhi kualitas SDM. Dan yang terjadi adalah SDM Korea Utara tergolong kategori rendah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus bersamaan dengan terjadinya peningkatan kualitas SDM sebuah negara agar masyarakat yang hidup di dalamnya memiliki kehidupan yang layak.

Kata Kunci: Pendidikan, Perbandingan, Korea, Kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang membahas terkait dengan kebijakan dalam mengatur pendidikan yang diterapkan pada suatu negara. Studi perbandingan pendidikan merupakan ilmu yang mengkaji tentang latar belakang hingga permasalahan-permasalahan pada pendidikan, dapat memunculkan perbedaan dan persamaan terkait teori serta praktik sistem pendidikan tersebut di negara-negara [1]. Setiap negara memiliki kebijakan sendiri-sendiri untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi setiap warga negaranya dan warga negara lain. Pendidikan merupakan aspek penting untuk negara, karena negara dapat dikategorikan dalam golongan negara maju maupun berkembang berdasarkan pendidikan yang diberikan dan hasil daripada pendidikan tersebut dapat merubah kehidupan sebuah negara. Perkembangan suatu negara dipengaruhi oleh kualitas SDM. SDM yang unggul dikarenakan memiliki pola berpikir maju dan hal tersebut diperoleh dari pendidikan berkualitas baik [2].

Sumber daya manusia tidak hanya menjadi pemicu dalam peningkatan mutu pendidikan sebuah negara, melainkan metode perbandingan pendidikan juga memiliki andil pada peningkatan mutu pendidikan negara karena hasil dari studi perbandingan pendidikan akan menjadi sumber informasi bagi pendidikan di negara itu sendiri. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan ke arah yang positif dan dapat menghasilkan sumber daya manusia siap saing [3].

Korea merupakan negara bekas jajahan Jepang yang terletak pada Benua Asia Timur. Korea selatan dan korea utara merupakan dua negara yang terpecah akibat perang dunia II bekas jajahan negara Jepang. Terpecahnya negara Korea ini dipengaruhi oleh dua kubu yaitu Amerika yang menyebarkan ideologi liberalisme dan Uni Soviet dengan ideologi komunis [4]. Negara Korea Selatan dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, akses transportasi dan kehidupan sangat mudah, rakyat hidup dengan damai karena segala kebutuhan sudah disediakan dan disubsidi oleh pemerintah. Dengan adanya Kpop membuat negara Korea Selatan menjadikan sebagai pusat perhatian. Banyak idol-idol Kpop yang menjadi *Brand Ambassador* dari merk terkenal dunia baik dunia *fashion*, *sport*, *music*, dan lain-lain [5].

Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Korea Utara. Korea Utara lebih dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah nuklir banyak, sehingga apabila negara lain membuat Korea Utara merasa terancam maka nuklir merupakan senjata utama untuk mempertahankan negara. Jika pelepasan nuklir yang dilakukan Korea Utara ini terjadi, maka tidak akan terlepas dari perang dunia lagi. Keadaan sosial, lingkungan, hingga politik di Korea Utara berbeda dan jauh tertinggal dari Korea Selatan. Korea Utara tidak mengenal mengenai hak dan kebebasan, seluruh penduduknya diawasi sangat ketat oleh pemerintahan disana. Apabila rakyat tertangkap basah saat membelot ke Korea Selatan hukuman yang diberikan akan diberlakukan untuk seluruh anggota keluarga. Melalui bahasa mudahnya bahwa di Korea Utara tidak mengenal HAM. Perkembangan teknologi di Korea Utara belum merata di Korea Selatan. Desa-desa di Korea Utara penggunaan listrik sangat dibatasi. Banyak pasar gelap yang menjual produk-produk dari Korea Selatan berupa *skincare*, kebutuhan rumah tangga, dan baju.

Selain perbedaan dari segi politik dan sosial, dua negara ini memiliki sistem pendidikan yang sangat berbeda. Korea Selatan sangat memperhatikan mengenai perkembangan pendidikan di dunia, kurikulum yang diberikan selalu berasal dari revisi terbaru dan mengikuti perkembangan zaman terkait dengan fenomena maupun teknologi. Teknologi internet di Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan jaringan internet data seluler tercepat di dunia [6]. Melalui sarana teknologi tersebut seluruh kegiatan di Korea Selatan sudah serba digitalisasi. Sedangkan di Korea Utara pemanfaatan dari internet sangatlah diawasi dengan ketat. Hal ini dilakukan pemerintah Korea Utara agar penduduknya tidak dapat menyuarakan hak dan pendapatnya yang dapat meruntuhkan dinasti pemerintahan presiden di Korea Utara.

Merujuk berbagai alasan dan permasalahan terkait penerapan pendidikan di Korea Selatan dan Korea Utara ini terjadinya penelitian terkait perbandingan sistem pendidikan. Bagaimana sejarah awal adanya perpecahan dari dua negara. Bagaimana sistem pemerintahan dapat berimbas kepada kualitas pendidikan di masing-masing negara. Bagaimana kualitas SDM masing-masing negara dapat mempengaruhi status kemajuan sebuah negara. Tujuan dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait sistem maupun kebijakan tentang pendidikan pada dua negara tersebut yang sangat bertolak belakang. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terkait pentingnya untuk meningkatkan kualitas SDM suatu negara. Dengan terjadinya peningkatan kualitas SDM, akan berimbas terhadap peningkatan kehidupan sosial, pendidikan, sistem pemerintahan, bahkan politik dalam suatu negara. Hasil dari penelitian dapat menjadi acuan untuk dapat memberikan perubahan dengan permasalahan yang serupa baik dalam skala makro maupun mikro.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif komparatif dengan metode studi literatur. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data hasil olahan dari mengumpulkan informasi dan data, klasifikasi data, menyajikan data, serta melakukan reduksi data melalui pengambilan kesimpulan dari beberapa literatur pustaka. Sumber pustaka untuk penelitian ini adalah berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, hingga *website page* yang berkaitan mengenai sistem pendidikan baik di Korea Selatan maupun di Korea Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pendidikan antara Korea Selatan dan Korea Utara sangat berbeda. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan yang digunakan kedua negara ini juga berbeda. Oleh karena itu sistem pendidikan maupun kebijakan yang diterapkan pada Korea Selatan juga berbeda dengan di Korea Utara. Pemerintahan Korea Selatan sangat mengedepankan sektor pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini terbukti dengan sistem pendidikan di Korea selatan menduduki peringkat atas ke-2 dunia. Korea Selatan juga menjalin kerjasama dengan Indonesia pada sektor pendidikan, hal ini dibuktikan dengan adanya program yang dijalankan oleh KOICA (*Korea International Cooperation Agency*) antara lain *KOICA Scholarship Program*, *Reguler Program*, dan *World Friends KOICA Volunteer* atau *KOICA Overseas Volunteer Program* [7]. Dampak dari kerjasama tersebut adanya peningkatan pendidikan dan kualitas SDM yang efektif, hingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan negara Indonesia.

3.1. Sejarah Korea

Negara Korea merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 tepat dua hari sebelum kemerdekaan di Indonesia. Hampir sama dengan Indonesia, negara Korea juga dijajah oleh Jepang pada saat itu. Salah satu penyumbang kemenangan di Korea berasal dari warga Korea bagian utara. Pada Korea Utara terdapat gerakan rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan yaitu berasal dari tiga kekuatan itu adalah nasionalis, sosialis, dan mantan pemimpin Korea yang berada di China dan USSR. Gerakan nasionalis ini merupakan pemahaman yang diajarkan oleh Uni Soviet dan China di permulaan Jepang menduduki Korea pada tahun 1910 [8]. Setelah Jepang kalah pada perang dunia II dua kubu besar mendominasi pada bagian utara dan selatan Korea, Amerika di selatan dan Uni Soviet di utara. Sehingga penduduk Korea bagian Utara banyak yang menggunakan ideologi komunisme dan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara warga bagian selatan dan utara. Meskipun negara Korea adalah negara bekas jajahan dari Jepang, tetapi akibat dari invasi negara Amerika dan Uni Soviet menyebabkan terjadinya perpecahan hingga perang dingin antar negara Korea bagian Selatan dan Utara. Penyebab perang dingin ini dikarenakan pihak Amerika dan Uni Soviet tidak mendapatkan jalan tengah untuk penyatuan Korea kala itu.

Akibat perang dingin yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara menjadikan negara Korea terbelah menjadi dua bagian, sehingga masing-masing negara membuat sistem pemerintahan dan kebijakan masing-masing sepaham dengan panutan mereka. Keadaan geografis dari kedua negara ini juga memberikan dampak yang cukup terhadap perkembangan pada masing-masing negara. Negara Korea Utara berlokasi strategis dimana kekayaan sumber daya alam nya sangat melimpah yang meliputi mineral, batu bara, dan hutan yang luas. Korea Selatan kekayaan sumber daya alam nya berbanding terbalik dari Korea Utara, yang mana jumlah mineral terbatas. Oleh karena itu pemerintah Korea Selatan sangat memperhatikan, memprioritaskan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Korea Selatan sendiri didirikan pada tahun 1948 dan menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial dengan dipimpin oleh presiden serta dibantu dengan perdana menteri yang ditunjuk presiden secara langsung. Setelah terjadi Perang Korea yakni sekitar tahun 1950 - 1980, Korea Selatan sangat bergantung

dengan bantuan yang diberikan dari pihak sekutu yakni Amerika. Hal ini akibat dari Perang Korea berimbas terhadap ekonomi dan keamanan negara Korea Selatan tidak dalam kondisi yang baik. Pada sekitar tahun tersebut fokus diplomatik yang dilakukan Korea Selatan terpusat dengan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Korea Selatan sedang memperjuangkan untuk memperoleh pengakuan sebagai sebuah negara dan mendapatkan legitimasi internasional akibat perselisihan serta persaingan terhadap Korea Utara. Sehingga dengan alasan tersebut Korea Selatan memegang erat bantuan dari Amerika agar negaranya tidak hancur karena krisis. Pada tahun 1970-an presiden Korea Selatan yakni Park Chung-Hee demi bisa menggandeng Amerika untuk waktu lama, pernah memberikan bantuan di bidang militer maupun diplomatik politik untuk membuat Amerika percaya. Kebijakan Park Chung-Hee untuk membantu Amerika tergambarkan pada tiga kasus yaitu: melakukan normalisasi hubungan dengan Jepang karena didesak oleh Amerika, mengirim tentara pergi ke Vietnam karena Korea Selatan khawatir akan ditinggalkan Amerika, dan pemberhentian proyek pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Selatan karena pihak Amerika tidak setuju [9].

3.2. Sistem Pendidikan Korea Selatan dan Korea Utara

Perkembangan pendidikan di Korea pasca perang dunia II adalah adanya sistem pendidikan terbaru yaitu dengan kolaborasi atau gabungan sistem pendidikan dari barat dengan tradisional Korea. Di tahun 1953 Korea membuat kebijakan terkait pendidikan dasar wajib dan gratis selama enam tahun [10]. Sistem pendidikan di Korea Selatan menduduki peringkat 2 dunia pada tahun 2023 ini, sedangkan sistem pendidikan di Korea Utara menduduki peringkat 110 dunia [11]. Korea Selatan dalam mengatur kebijakan dalam pendidikan telah menerapkan sistem sentralistik, sehingga antara sekolah negeri, swasta, kota, desa, maupun provinsi memiliki peraturan yang serupa serta dalam membuat kebijakan di sekolah harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan pusat tanpa harus melalui pemerintah daerah setempat [12].

Kebijakan terkait pendidikan sangat tersistematis di Korea Selatan. Sistem administrasi pendidikan di Korea Selatan terdiri dari presiden, perdana menteri, dewan nasional pendidikan dan kementerian pendidikan. Kementerian pendidikan memegang kendali pendidikan Korea Selatan karena sebagai badan pelaksanaan pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang terhadap sistem pendidikan di Korea Selatan. Tugas dan wewenang dari Kementerian Pendidikan Korea Selatan adalah memiliki kendali terkait administrasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pendidikan Korea baik kegiatan pendidikan dan akademik di tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum di Korea Selatan dikeluarkan oleh organisasi *Korea Institute of Curriculum and Evaluation* (KICE). Tugas dan wewenang dari KICE ini adalah merancang kurikulum yang akan digunakan di Korea Selatan, mengembangkan metode evaluasi, hingga melaksanakan penelitian agar kualitas pendidikan di Korea Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kurikulum standar di Korea Selatan adalah meliputi Bahasa Korea, kesenian, kode etik, IPA, matematika, IPS, penjaskes, musik, Bahasa Inggris.

Korea Selatan memberlakukan sistem pendidikan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA atau SMK, dan 4 tahun Perguruan Tinggi. Jam masuk untuk belajar di sekolah umumnya sama yakni dari pukul 08.00 KST pagi [13]. Korea Selatan memberikan kebijakan terkait biaya pendidikan, dengan menggratiskan biaya pendidikan pada tingkat dasar sekolah negeri. Untuk tingkat menengah dan atas pemerintah Korea Selatan membantu biaya pendidikan namun tidak secara penuh. Dengan kebijakan demikian sangat membantu warga negara untuk memperoleh pendidikan tinggi dengan biaya yang dapat dijangkau untuk seluruh kalangan. Pemerintahan Korea Selatan juga memperhatikan warga yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Dengan memberlakukan kebijakan terkait bantuan biaya pendidikan secara merata memberikan kesempatan yang rata bagi seluruh warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kurikulum yang didapatkan di tingkat SD (6-12 tahun) adalah pendidikan moral, bahasa korea, ilmu sosial, aritmatika, sains, musik, olahraga, kerajinan dan kegiatan ekstrakurikuler [14].

Sistem pendidikan di Korea Utara didasarkan pada “cita-cita revolusioner” sehingga mater-materi yang diajarkan hanya sebatas ideology Juche, kebijakan partai buruh, tradisi revolusioner, keyakinan komunis, dan optimisme revolusioner. Semua pelajar di Korea Utara diawasi dengan ketat untuk menghindari dari pelanggaran yang dibuat, jika pelajar ketahuan melakukan pelanggaran maka akan dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat, meskipun masih duduk di bangku sekolah dasar. Pendidikan di Korea Utara terdiri dari tingkat TK, SD, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Kurikulum yang diajarkan pada pelajar di seluruh tingkat pendidikan tidak lepas dari mempelajari sejarah tentang ideology Juche serta pendiri dan pemimpin Korea Utara (Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Suk) atau biasa disebut dengan 3 generasi pemimpin gunung baekdu. Revisi dari kurikulum ini adalah menambahkan pelajaran “Tindakan Revolusioner Kim Jong Un” untuk sekolah menengah. Pada sekolah tingkat perguruan tinggi seluruh

mahasiswa diwajibkan untuk mengambil kelas ideologi antara lain Filsafat Ideologi Juche, Sejarah Revolusi, dan Ekonomi Politik Juche [15].

3.3. Kualitas Sumber Daya Manusia Korea Selatan dan Korea Utara

Korea Selatan merupakan salah satu negara maju di Asia Timur dan Korea Utara merupakan negara berkembang. Meskipun keduanya merupakan negara yang sama pada masa sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh dari invasi Blok Timur dan Blok Barat memberikan dampak dalam kemajuan negara pada era modern ini. Setelah menjadi negara yang berdaulat, Korea Selatan dan Korea Utara menerapkan kebijakan pemerintah masing-masing pada setiap warganya. Kebijakan yang berbeda pada kedua negara ini mengakibatkan kesenjangan dalam dunia pendidikan. Korea Selatan menempati peringkat atas terkait sistem pendidikan dan termasuk dalam 10 besar negara dengan *score* pendidikan tertinggi yang dilakukan oleh PISA. Menurut hasil *survey* tahun 2023 PISA Korea Selatan menduduki peringkat 7 sebagai negara dengan nilai tertinggi dalam hal pengetahuan sains (521), matematika (528), dan literasi membaca (503) [16]. Korea Selatan merupakan negara yang sangat mengedepankan pendidikan. Sistem pendidikan di Korea Selatan harus mendapat perhatian besar bagi negara-negara berkembang agar dapat mengikuti langkah Korea Selatan menjadi negara maju dan SDM yang tinggi.

Guru-guru di Korea Selatan mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Untuk mendapatkan lisensi ataupun sertifikat guru untuk mengajar tidaklah gampang di Korea Selatan. Calon guru harus memperoleh sertifikat guru prasekolah, guru sekolah dasar, dan guru menengah yang diberikan oleh kepala sekolah dengan cara melaksanakan magang di sekolah negeri. Untuk ketentuan menjadi dosen di Korea Selatan harus minimal bergelar S2 agar dapat mengajar di jenjang sarjana, serta bergelar S3 untuk dapat mengajar di jenjang magister. Guru yang telah mengajar selama lima tahun akan diberlakukan rotasi mutasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi guru agar dapat merasakan mengajar di sekolah dengan rating baik hingga buruk.

Korea Utara merupakan negara yang memberlakukan sistem otoriter. Akibat dari ideologi komunisme ini semua warga harus mendewakan pemimpin di Korea Utara yang tak lain adalah presidennya. Hak dan kebebasan merupakan hal yang sangat sulit didapatkan di Korea Utara. Seluruh penduduknya harus menaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh presiden dan tidak boleh ada yang membantah. Jumlah penduduk di Korea Utara adalah kurang lebih setengah dari penduduk Korea Selatan. Rendahnya angka kelahiran di Korea Utara dapat mempengaruhi keberlangsungan di Korea Utara karena akan berdampak pada kurangnya tenaga kerja yang terjadi di masa mendatang. Penduduk Korea Utara tidak sedikit yang akhirnya membelot ke Korea Selatan. Pembelotan masyarakat Korea Utara menurut data dari Tempo di tahun 2019 sudah ada sekitar 31 ribu orang sipil yang melakukan pembelotan ke Korea Selatan terhitung sejak tahun 1953. Pemerintah Korea Utara memberikan hukuman kejam bagi pembelot yang ketahuan. Menurut data dari PBB bahwa Korea Utara memberlakukan hukuman mati ataupun kerja paksa selama lima tahun bagi pembelot yang tertangkap basah [17]. Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas internet dengan mudah. Pemerintah Korea Utara memblokir seluruh akses internet di negaranya dengan tujuan penduduk tetap patuh dan tunduk dengan rezim pemerintahan. Dengan sedikit wawasan terkait kebebasan individu hingga HAM di Korea Utara, maka rezim pemerintahan akan tetap berlanjut tidak dapat diruntuhkan. Eksploitasi anak-anak dibawah umur menjadi hal biasa di Korea Utara. Melalui laporan dari organisasi NGO Korea Selatan yang meneliti dan melaporkan segala bentuk kejahatan di Korea Utara memberitahukan bahwa kekerasan fisik di Korea Utara menjadi makanan sehari-hari bagi rakyat biasa. Pada tahun 2011 terdapat kasus ada anak di Korea Utara ketahuan karena melihat film dari Korea Selatan, anak tersebut dibawa dan dipenjara. Selama dipenjara anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang parah dan diluar batas wajar kemanusiaan. Setelah beberapa hari anak tersebut dikeluarkan dari penjara, dia meninggal dunia akibat pendarahan otak.

Kedua negara ini memiliki permasalahan yang sama yakni memiliki angka kelahiran yang rendah. Memberlakukan kebijakan wajib militer tiap warga negara Korea Utara (laki-laki dan perempuan) dengan waktu minimal 10 tahun dan Korea Selatan (laki-laki hingga batas usia 30 tahun) dengan lama waktu selama kurang lebih 18-21 bulan. Wajib militer ini diberlakukan di kedua negara adalah untuk mengantisipasi terjadinya Perang Korea lagi, dikarenakan saat ini antara Korea Selatan maupun Korea Utara status keduanya adalah masih perang dingin.

Pada penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan pada referensi terkait pelaksanaan pendidikan di Korea Utara. Sehingga sedikit sumber literatur yang membahas terkait pelaksanaan sistem pendidikan di Korea Utara dibandingkan dengan Korea Selatan. Pengaruh kebijakan pemerintah untuk memberikan akses ke dunia luar terkait buruknya sistem di Korea Utara juga menjadi keterbatasan pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini bukan untuk menjadikan generalisasi setiap negara, karena masing-masing negara memiliki konteks permasalahan yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki pandangan berbeda-beda

terkait sistem pendidikan yang akan diberlakukan tetapi memiliki tujuan yang sama. Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa kualitas SDM sangat mempengaruhi kehidupan negara. Pada pendidikan Indonesia, SDM guru harus ditingkatkan kualitasnya baik dari *soft skills* hingga *hard skills*. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan guru di Indonesia, akan memberikan dampak terhadap pola berpikir masyarakat yang semakin *upgrade* dengan perkembangan zaman sehingga negara Indonesia akan menjadi negara maju.

4. KESIMPULAN

Negara Korea merupakan negara yang sejatinya kaya, baik dari segi SDM dan SDA apabila Korea Selatan dan Korea Utara dapat bersatu menjadi negara Korea yang berdaulat. Akibat dari perbedaan ideologi dua negara menyebabkan sistem pemerintahan yang berbeda juga. Kebijakan dan peraturan dari dua negara ini berimbas terhadap sistem pendidikan dan dapat mempengaruhi daya saing SDM masing-masing negara.

Dengan ideologi liberalisme yang dianut Korea Selatan menyebabkan negara ini menjadi negara maju di kawasan Asia Timur dan menempati posisi peringkat atas dengan sistem pendidikan terbaik dunia. Dengan demikian SDM dari Korea Selatan dapat dikatakan sangat unggul. Akibat daya saing pelajar dan tekanan yang dihadapi selama mengenyam pendidikan menyebabkan pelajar di Korea Selatan melakukan bunuh diri karena merasa dibawah standar dan beranggapan hidupnya telah gagal total.

Negara Korea Utara merupakan negara yang menganut ideologi komunisme. Kendali penuh berada di tangan presiden sehingga sistem pemerintahan di Korea Utara bersifat otoriter. Sistem pendidikan di Korea Utara harus dan wajib untuk mempelajari ideologi Juche dari semua tingkatan (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi). SDM di Korea Utara tergolong dalam kategori rendah. Korea Selatan dan Korea Utara memiliki permasalahan yang serupa yakni negara tergolong angka kelahiran rendah, dan sama-sama memberlakukan wajib militer.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka harus bersamaan dengan adanya peningkatan kualitas SDM pada suatu negara. SDM yang berkualitas baik akan mempengaruhi sistem pendidikan hingga keadaan suatu negara menjadi lebih baik dan makmur dari kehidupan sebelumnya. Peningkatan SDM harus berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pelonjakan tingkat pengangguran maupun kejahatan akibat dari banyaknya SDM yang melebihi kuota kapasitas. Serta agar warga negara memiliki kesempatan kehidupan yang layak.

REFERENCES

- [1] A. W. Syakhrani, "Perbandingan Pendidikan," *General and Specific Research*, 2022.
- [2] Y. H. Elise Muryanti, "Studi Perbandingan Sistem Pendidikan Dasar di Indonesia dan Finlandia," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2021.
- [3] A. W. Syakhrani, "Perbandingan Pendidikan," *General and Specific Research*, 2022.
- [4] M. P. Anisa Septianingrum, *Sejarah Asia Timur Dari Masa Peradaban Kuno Hingga Modern*, KABUPATEN BANTUL: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- [5] E. T. R. & H. A. D. S. M. S. R. M. S. M. Diana Widhi Rachmawati, *BAHASA KOREA*, Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- [6] A. Suryaningsih, "Gagasan Pengembangan Augmented Reality pada Buku Bacaan sebagai Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa (Adaptasi Percepatan Literasi dari Korea Selatan)," *Pelatihan Guru di Luar Negeri*, vol. 4, no. 1, 2019.
- [7] G. PRINCES, "ANALISIS DAMPAK DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN DI INDONESIA MELALUI KOICA (KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY) DALAM SEKTOR PENDIDIKAN (2017-2021)," *Universitas Kristen Satya Wacana*, 2023.
- [8] N. F. Abidin, "Dinamika Politik, Heriofikasi KIM IL SUNG, dan Ideologi Juche di Korea Utara (1948-2011)," vol. 20, no. 1, 2020.
- [9] SEUNG-YOON, *Politik luar negeri Korea Selatan penyesuaian diri terhadap masyarakat internasional Yang Seung-Yoon, Mochtar Mas'ood*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press 2004.
- [10] H. S. Wibowo, *Pendidikan di Korea Selatan : Tradisi, Inovasi, dan Tantangan Masa Depan*, Tiram Media, 2023.
- [11] I. E. D. (. W. <https://worldtop20.org/education-database/>.

- [12] A. H. N. Destri Wulandari, “Sistem Pendidikan Korea Selatan Dan Indonesia,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [13] E. T. R. & H. A. A. D. S. M. S. R. M. S. M. Diana Widhi Rachmawati, *BAHASA KOREA*, Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- [14] I. N. Suastika, “ANALISIS KOMPARASI SOCIAL STUDIES DI CHINA DAN KOREA,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 1, 2021.
- [15] L. i. N. K. (. P. https://pscore.org/life-north-korea/forced-to-hate/#pll_switcher.
- [16] O. D. K. (. O. <https://data.oecd.org/korea.htm>.
- [17] datatempo.co, *Konflik Berkepanjangan Duo Korea di Semenanjung Korea Jilid IV*, Tempo Publishing, 2019.